

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah serangkaian pembangunan semua aspek yang saling berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aspek pembangunan nasional adalah dibidang ekonomi. Perekonomian yang sehat dapat tercipta dari kerjasama pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Penyebaran yang merata dari hasil pembangunan di bidang ekonomi tersebut juga akan diwujudkan melalui kebijaksanaan yang serasi antara lain di bidang perbankan.

Perbankan berada pada posisi yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian negara serta dalam pembagian pendapatan di seluruh masyarakat. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di Indonesia bank syariah memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008. Dimana perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, unit usaha syariah, meliputi kelembagaan

dan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan (Ismail, 2011: 33).

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan undang-undang. No.10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan pembiayaan dan penempatan dana yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

BPR Syariah Bumi Rinjani Batu memiliki visi dan misi menjadi bank pembiayaan rakyat syariah yang sehat dan terpercaya, menjalankan usaha disektor perbankan yang mengandalkan pada optimalisasi sumberdaya insani yang mempunyai budaya kerja shidiq, Amanah, Tabligh, Fatonah dan didukung oleh sistem dan teknologi yang sepadan dalam rangka ikut membangun kemakmuran masyarakat dan memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholder.

BPR Syariah Bumi Rinjani Batu juga memiliki tujuan yang tertuang pada UU No.21 Tahun 2008 pasal 3 dan 4, adalah mengusahakan perusahaan bank pembiayaan rakyat (BPR) yang berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut

perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, investasi dan menyalurkan dana masyarakat berupa pembiayaan berdasarkan akad.

Beberapa produk yang dimiliki oleh BPR Syariah Bumi Rinjani Batu yaitu Tabungan Syariah, Deposito Syariah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2013: 113).

Dengan adanya produk Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu diharapkan dapat membatasi dan bahkan mengurangi perkreditan non formal yang cenderung memberatkan masyarakat. Salah satu lembaga non formal tersebut seperti pemberian kredit oleh rentenir, atau biasa disebut sebagai lintah darat yang dianggap merugikan masyarakat karena memberikan tingkat suku bunga yang tinggi.

Masyarakat bisa mengajukan Pembiayaan Murabahah ke BPR Syariah Bumi Rinjani Batu dengan persyaratan yang mudah sebagai salah satu alternatif untuk menghindari terbelitnya hutang di rentenir. Meskipun banyak kemudahan yang didapat, pada umumnya masyarakat masih kurang memahami prosedur dan tata cara syarat pemberian Pembiayaan Murabahah sehingga mereka masih tetap melakukan pinjaman pada rentenir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis ingin memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai prosedur dan tata cara pemberian Pembiayaan Murabahah. Sehingga, penulis tertarik untuk mengambil judul “SISTEM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPR SYARIAH BUMI RINJANI BATU KANTOR PUSAT”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pemberian Pembiayaan Murabahah pada BPR Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Pusat ?
2. Bagaimana efektivitas sistem pemberian Pembiayaan Murabahah pada BPR Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Pusat ?

C. Batasan Masalah

Agar penulisan Tugas Akhir ini tidak menyimpang dari tujuan yang semula direncanakan dan dapat mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan berikut:

1. Pelaksanaan sistem pemberian Pembiayaan Murabahah pada BPR Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Pusat.
2. Efektivitas sistem pemberian Pembiayaan Murabahah pada BPR Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Pusat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem pemberian Pembiayaan Murabahah pada BPR Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Pusat.
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas sistem pemberian Pembiayaan Murabahah pada BPR Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Pusat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian dari penulis adalah:

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem pemberian pembiayaan murabahah pada BPR Syariah Bumi Rinjani Kantor Pusat. Dan juga untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi BPRS Bumi Rinjani Batu

Dapat digunakan sebagai upaya untuk memperkenalkan eksistensi BPRS Bumi Rinjani Batu kepada masyarakat luas dan dapat dijadikan bahan evaluasi atau masukan khususnya terhadap sistem pemberian pembiayaan murabahah .